



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS BELANJA DAN KINERJA PELAYANAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR
(TAHUN 2006-2009)**

Oleh :

Okky Prasetiawan
06 151 116

*Mahasiswa Program Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
2011**

**Analisis Belanja dan Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar
(tahun 2006-2009)**

Skripsi S1 oleh: Okky Prasetiawan Pembimbing Skripsi: Drs. Masrizal, M.Soc,
Sc

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang anggaran belanja dinas kesehatan dan kinerja pelayanan kesehatan didasarkan anggaran belanja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alokasi belanja dan juga untuk mengetahui kemampuan dinas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Datar. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yakni metode untuk melihat gambaran pencapaian kinerja pelayanan pada bidang kesehatan. Alat analisis yang dipakai adalah realisasi belanja dan kinerja pelayanan masing-masing pada bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Data yang digunakan adalah data tahunan anggaran belanja dinas kesehatan, data tahunan jumlah penduduk, balita, rumah sakit, puskesmas dan pustu, posyandu, tenaga kesehatan, dokter, dan bayi di Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan anggaran setiap tahunnya berbanding terbalik dengan kinerja pelayanan dinas kesehatan atau terdapat hubungan yang negatif antara terdapat pengaruh yang negatif antara selisih logaritma jumlah uang beredar Indonesia dengan Amerika terhadap nilai tukar dolar, terdapat hubungan yang negatif antara selisih logaritma suku bunga Amerika dengan Indonesia terhadap nilai tukar dolar dan pengaruh yang positif antara selisih keduanya. Oleh sebab itu, pemerintah Tanah Datar diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pengalokasian anggaran belanja agar kenaikan anggaran belanja sejalan dengan meningkatnya kinerja pelayanan dinas kesehatan di Kabupaten Tanah Datar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-Undang yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Secara sempit, otonomi daerah berarti terjadinya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dengan pemenuhan azas akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan dana publik sangat menuntut adanya pengelolaan dana daerah yang bertanggungjawab dan diharapkan daerah dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurut Miewald dan Pamudji “Sentralisasi dan desentralisasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, pada dasarnya berkenaan dengan “*delegation of authority*” yang dapat diukur dari sejauh mana unit- unit bawahan memiliki wewenang dan tanggung jawab di dalam proses pengambilan keputusan”. (Widodo 2001)

Otonomi daerah sebagai suatu kebijakan publik dari pemerintahan pusat dalam bentuk regulasi bukanlah suatu cara yang menjamin adanya peningkatan kemampuan pembiayaan daerah dan menjamin adanya kehematan dalam pengelolaan belanja bila regulasi yang dikeluarkan tidak secara tegas dan transparan mampu mengatur seluruh aspek pengelolaan keuangan. Dengan bergulirnya otonomi daerah diharapkan daerah dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 2 menjelaskan tentang perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan jaminan sosial.

Untuk melihat apakah pemerintah daerah berhasil atau gagal menjalankan otonomi daerah maka perlu diadakan suatu penilaian untuk itu. Sehubungan dengan hal itu Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Evaluasi Kinerja Otonomi Daerah yang merupakan pelaksanaan PP No. 6 Tahun 2008 yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 Februari 2008.

Kabupaten Tanah Datar menjadi satu dari empat daerah di Indonesia yang dinilai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai yang paling berprestasi dan berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah, hal ini dapat dilihat dari apa yang telah dihasilkan oleh Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2000-2004, mulai dari sistem standar pelayanan publik yang optimal sampai pada meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar dari 1,7 miliar rupiah pada tahun 2000 menjadi 15

miliar pada tahun 2004, atau terjadi peningkatan sebesar 850 persen (Kompas (2004). Peningkatan PAD yang begitu besar akan berdampak pada anggaran yang dianggarkan bagi tiap-tiap dinas salah satunya Dinas Kesehatan.

Bukan hanya pada tahun 2000-2004 saja terjadi peningkatan anggaran belanja kesehatan, pada tahun 2006-2009 juga terjadi peningkatan anggaran belanja kesehatan Kabupaten Tanah Datar yakni sebesar Rp.29.211.235.700,- tahun 2006 terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2009 yakni sudah sebesar Rp.33.911.840.455,-. Peningkatan anggaran belanja dinas kesehatan ini jika dilihat secara umum meningkatkan kinerja pelayanan dinas kesehatan hal ini dapat dilihat dari menurunnya persentase balita gizi buruk dari 0,19% pada tahun 2008 menjadi 0,10% pada 2009 dengan anggaran sebesar Rp.32.895.958.087,- tahun 2008 dan Rp.33.911.840.455,-, begitu juga dengan peningkatan rasio posyandu per satuan balita dari 16,330% tahun 2008 menjadi 20,811% pada tahun 2009, hal yang sama juga terjadi pada rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk, meningkat dari 1,475% tahun 2008 menjadi 1,679% pada tahun 2009. Dan rasio dokter persatuan penduduk juga mengalami peningkatan dari 0,178% tahun 2008 menjadi 0,246% pada tahun 2009.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah dalam usahanya mencapai tujuan otonomi daerah, antara lain dilakukan oleh Prasajo, Kurniawan, dan Hasan (2005); Steer (2005); Sukarna, Budiningsih, dan Riyarto (2006). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasajo, Kurniawan dan Hasan (2005) bahwa kunci semua keberhasilan dalam pelaksanaan program-program inovasi di

kabupaten Jembrana adalah adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana khususnya Bupati untuk selalu meningkatkan perbaikan pelayanan masyarakat dan efisiensi penggunaan anggaran dalam semua sektor pembangunan.

Steer (2005) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan, pendidikan dan infrastruktur selalu berada dibawah rata-rata nasional. Walaupun ada dana otonomi khusus namun penganggaran lebih difokuskan untuk belanja rutin sehingga belanja pelayanan tetap terabaikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“Analisis Belanja Terhadap Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana alokasi belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009.
2. Bagaimanakah kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dalam memenuhi kinerja pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alokasi belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009.

2. Untuk mengetahui kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kinerja pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengalokasian belanja dan penilaian kinerja di masa yang akan datang.
2. Bagi pembaca penelitian ini, sebagai informasi dalam menilai pengalokasian belanja dan penilaian kinerja pelayanan kesehatan di masa yang akan datang.
3. Bagi Penulis, penulis memperoleh tambahan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan dalam mempraktekkan ilmu dan teori yang diperoleh selama kuliah.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Analisis dalam penelitian ini dibatasi hanya pada alokasi belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dan kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dalam memenuhi kinerja pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Datar.
2. Data yang digunakan adalah data *sekunder* tahunan dari tahun 2006-2009.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, setiap bab dapat dirinci ke dalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang otonomi daerah, APBD, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan tolak ukur kinerja dinas kesehatan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan metode analisis untuk memperoleh jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran lokasi dimana penelitian ini dilakukan baik sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang dilakukan serta implikasi kebijakan dari penelitian tersebut.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka berikut ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dari kesimpulan ini dapat dilihat realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2006-2009. Pada tahun 2006 anggaran belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp. 29.211.235.700, dengan realisasi anggaran belanja sebesar 86,63%. Pada tahun 2007 anggaran belanja Dinas Kesehatan mengalami penurunan dengan total anggaran belanja sebesar 28,409,448,059.50, hal ini disebabkan karena pada tahun sebelumnya kemampuan Dinas Kesehatan menyerap (*underspending*) menurun, namun anggaran ini dapat direalisasikan dengan baik dengan realisasi anggaran belanja sebesar 92.66%. Pada tahun 2008 anggaran belanja Dinas Kesehatan kembali mengalami kenaikan mencapai angka 32,895,958,087.20, walaupun demikian realiasasi anggaran belanja Dinas Kesehatan tidak dapat dimaksimalkan dan hanya terealisasi sebesar 85.50% hal ini menunjukkan persentase yang menurun dari realisasi anggaran tahun sebelumnya. Perkembangan yang menggembirakan terlihat pada tahun 2009, dimana anggaran belanja Dinas Kesehatan mencapai 33,911,840,455.62, dan

anggaran ini dapat direalisasikan secara maksimal dengan persentase anggaran belanja sebesar 93.12%. Rata-rata alokasi untuk belanja pegawai adalah 59,11% dari keseluruhan belanja sektor kesehatan, alokasi untuk belanja barang dan jasa adalah sebesar 14,24% dari rata-rata belanja keseluruhan, sedangkan untuk belanja modal alokasinya adalah sebesar 23,23% dari rata-rata belanja keseluruhan.

Sedangkan menurunnya anggaran belanja Dinas Kesehatan yang terjadi pada Tahun 2006-2007 disebabkan karena beberapa factor antara lain :

- a. Terlambatnya Pengesahan perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), pengesahan perubahan APBD baru dilaksanakan pada bulan November, keterlambatan pengesahan APBD mengakibatkan tidak terserapnya seluruh anggaran. Hal ini juga mengakibatkan banyak program yang direncanakan tidak teralisasi, karena waktu pelaksanaan yang tersisa sangat sempit. Sehingga mengakibatkan Dinas Kesehatan tidak mampu mencapai target kinerjanya, sehingga setiap tahun kinerjanya cenderung mengalami penurunan
- b. Menurunnya anggaran untuk Dinas kesehatan disebabkan karena, ada hal lain yang sangat mendesak untuk dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sehingga Alokasi anggaran Belanja untuk Dinas Kesehatan ini harus dipangkas dan dialokasikan kepada SKPD lain yang lebih membutuhkan.(pemilu, gempa bumi dan lain-lain)

2. Dari penelitian ini maka dapat disimpulkan Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan pada tahun 2006-2009, yang mana indikatornya sebagai berikut :

a. Persentase balita gizi buruk

Jika dilihat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan pada indikator ini yaitu dari rata-rata persentase balita gizi buruk tahun 2006-2009 yaitu sebesar 0,157 %, hanya pada tahun 2006 dan 2009 tingkat balita gizi buruk di kabupaten Tanah Datar baik, hal ini karena dinas kesehatan selalu melakukan penyuluhan-penyuluhan.

b. Ratio rumah sakit persatuan penduduk

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan pada indikator ini jika dilihat dari rata-rata rasio rumah sakit dari tahun 2006-2009 yaitu sebesar 0,029%, hanya pada tahun 2006 rasio rumah sakit diatas rata-ratabahwa rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan, dan tahun 2008-2009 konstan.

c. Ratio Rumah sakit dan pustu persatuan penduduk

Rasio Puskesmas dan Pustu mengalami peningkatan pada tahun 2007 dan 2009, dikarenakan oleh bertambahnya jumlah puskesmas yang tersedia seiring dengan jumlah penduduk terus meningkat.

d. Ratio posyandu persatuan Balita

Dari tahun 2006-2008 kinerja Dinas Kesehatan pada indikator ini terus mengalami penurunan, hal ini akibat dari semakin banyaknya balita

dan berkurangnya jumlah posyandu yang ada, berkurangnya jumlah posyandu sebagai akibat dari alokasi anggaran belanja modal yang tidak seimbang, karena pada tahun 2006-2008 juga terjadi pembangunan puskesmas dan pusku baru, sehingga dana yang ada tersedot kepada pembangunan puskesmas dan pusku tersebut

e. Ratio tenaga kesehatan persatuan penduduk

Semakin besarnya anggaran belanja tidak langsung setiap tahunnya yaitu sebesar 44,32% pada tahun 2006, 60,3% pada tahun 2007, 65,62% pada 2008 dan 66,22 pada 2009 tidak membuat kinerja Dinas Kesehatan pada indikator ini bagus, terbukti dengan menurunnya rasio tenaga kesehatan tiap tahunnya kecuali tahun 2009.

f. Ratio dokter persatuan penduduk

Sama halnya dengan tenaga kesehatan kinerja pelayanan dinas kesehatan pada indikator ini tidak terlalu bagus hanya 2 dari 4 tahun yang di teliti rasionya yang diatas rata-rata. Rendahnya rasio pada tahun 2007 dan 2008 lebih disebabkan berkurangnya jumlah dokter pada tahun-tahun tersebut sedangkan anggaran untuk belanja pegawai terus meningkat setiap tahunnya

g. Angka Kematian Bayi

Dilihat dari angka kematian bayi dari tahun 2006-2009 terlihat bahwa terjadi penurunan angka kematian bayi, ini menggambarkan meningkatnya kualitas hidup

h. Umur Harapan Hidup

Jika dilihat dari hasil penelitian ini bahwa angka harapan hidup masyarakat Tanah Datar dari tahun 2006-2009 terus mengalami kenaikan, ini berarti derajat kesehatan masyarakat Tanah Datar telah mengalami peningkatan.

6.2. Saran Penelitian

Berdasarkan analisa, pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Persentase balita gizi buruk

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan disamping itu mulai dengan meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan dan masyarakatnya.

b. Ratio rumah sakit persatuan penduduk

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan untuk menambah jumlah ruangan di rumah sakit, jumlah tenaga kesehatan dan kualitasnya serta lebih mengintensifkan imbauan penggunaan KB.

c. Ratio Puskesmas dan Pustu persatuan penduduk

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan untuk menambah

jumlah Puskesmas dan Pustu dan lebih meningkatkan supply dan ketersediaan obat-obatan.

d. Ratio Posyandu persatuan Balita

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan untuk menambah jumlah Posyandu dan giat melakukan penyuluhan kesehatan serta imunisasi.

e. Ratio tenaga kesehatan persatuan penduduk

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan disamping itu meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatannya agar pelayanan dan kualitas kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar yang berlaku.

f. Ratio dokter persatuan penduduk

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan untuk menambah jumlah Dokter yang ada.

g. Angka Kematian Bayi

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan disamping itu meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatannya agar pelayanan dan kualitas kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar yang berlaku dan semakin sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

h. Umur Harapan Hidup

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan disamping itu meningkatkan kualitas SDM masyarakatnya dan memberitahukan tentang bagaimana pola hidup sehat.

i. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar hendaknya terus berupaya dalam meningkatkan Kinerjanya, untuk anggaran yang bersifat program dan kegiatan hendaknya direncanakan lebih matang, sehingga tidak perlu menunggu perubahan anggaran untuk melaksanakannya.

j. Untuk dapat meningkatkan kinerja, maka diharapkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar untuk dapat memicu kesadaran masyarakat untuk memahami arti pentingnya kesehatan dalam kehidupan. Tanpa kesadaran serta partisipasi masyarakat tentang kesehatan maka keberhasilan program akan sulit dicapai.

k. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Bersama Dengan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar Hendaknya secara cepat melaksanakan perubahan anggaran dalam APBD kabupaten Tanah Datar, agar program-program yang telah dirancang dan direncanakan dapat direalisasikan dengan cepat, karena menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah pasal 86 ayat (2) “Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Ditetapkan dengan peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

- l. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu melakukan Evaluasi serta penilaian terhadap kinerja pelayanan yang dilakuakn oleh Dinas kesehatan Kabupaten Tanah Datar guna menjamin terlaksanya pelaksanaan program pembangunan sektor kesehatan yang ekonomis, efektif dan efisien.
- m. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Kesehatan hendaknya mengoptimalkan Pemanfaatan puskesmas dengan saran dan prasarana yang lebih lengkap tanpa ada batasan waktu untuk mengaksesnya.
- n. Meningkatkan Kerja sama Lintas sektor antar pemerintah, masyarakat dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan serta perlu meningkatkan akses pada sarana dan pelayanan kesehatan sehingga dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2008. *Pengalokasian Belanja Fisik Dalam Anggaran Pemerintah Daerah : Studi Empiris Atas Determinan Dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan*. <http://swamandiri.org>
- Akbar, Rusdi. 2007. “*Indikator Kinerja dengan Model Matriks Kinerja*”, dipresentasikan dalam Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah, World Bank Institute, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (PPE-FEUGM), dan Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD), Yogyakarta, 26-27 Januari.
- BPS. 2006-2008. **Tanah Datar Dalam Angka**. BPS Tanah Datar
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga.
- Halim, Abdul. 2002. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Isdijoso, Brahmantio, Tri Wibowo. 2002. *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi kasus : Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)*
- Kabupaten Tanah Datar. 2004. <http://www.kompas.co.id/kompascetak/0410/21/naper/1325394.htm>
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang **Kebijakan Pembangunan Kesehatan**
- Kumorotoro, Wahyudi. 2008. Teknik Penganggaran Untuk Perencanaan Sosial.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*
- Prasojo Eko, Teguh Kurniawan, Azwar Hasan. 2005. *Efisiensi Anggaran Sebagai Faktor Kunci Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Di Kabupaten Jembrana*.
- Dinas Kesehatan, 2006-2009. Profil Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Steer Andrew. 2005. *Analisis Pengeluaran Public Papua Sebuah Tinjauan Umum*, World Bank Publication.
- Sukarna Laode Ahmad, Nanis Budiningsih, Sigit Riyarto. 2006. *Analisis Kesiapan Dinas Kesehatan Dalam Mengalokasikan Anggaran Kesehatan Pada Era Desentralisasi*

Tayomah Nina, Syaikhul Usman. 2004. *Alokasi Anggaran Pendidikan Di Era Otonomi Daerah : Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pendidikan Dasar*

Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1992 *Tentang Kesehatan*

Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 *Tentang Pemerintah Daerah*

Widarta. 2001. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Jakarta : Larela Pustaka Utama

Widodo, Joko. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE Yogyakarta.

Wiyono, Eko Hadi. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Palanta